

Pegawai Kementerian Diduga

Dari Halaman 1

untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.
"Selanjutnya dengan bantuan dari beberapa oknum pada Kementerian dan Lembaga, terbitlah bukti kepemilikan hak berupa SHGB dan SHM di atas perairan laut Desa Kohod," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (11/2).
Di sisi lain, Djuhandhani mengatakan penyidik saat ini juga telah menyita sejumlah barang bukti usai menggeledah kantor hingga rumah

Kepala Desa Kohod Arsin.
Ia mengatakan penyitaan barang bukti dilakukan penyidik dari tiga lokasi pengeledahan, pada Senin (10/2) malam. Ketiga lokasi itu yakni Kantor Desa Kohod, Rumah Kepala Desa Kohod Arsin, serta rumah Sekretaris Desa Kohod.
"Barang bukti yang telah disita tersebut adalah benda yang digunakan untuk melakukan pemalsuan dan alat yang digunakan untuk membuat surat palsu," jelasnya.
Selain itu, ia menyebut penyidik turut menyita barang bukti dokumen pendukung yang diduga digunakan untuk membantu pemalsuan

dokumen.
Sebelumnya Bareskrim Polri telah meningkatkan status perkara kasus dugaan pemalsuan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Hak Milik (SHM) pagar laut Tangerang ke tahap penyidikan.
Melalui peningkatan status tersebut artinya penyidik telah menemukan unsur dugaan tindak pidana. Selanjutnya penyidik akan melakukan pemeriksaan saksi hingga pengumpulan alat bukti untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini. **(cnni/js)**

Modus Kades Diungkap

Dari Halaman 1

handani Rahardjo Puro mengatakan penyidik sudah memeriksa Arsin, istrinya, dan sejumlah saksi lain yang mengetahui penerbitan sertifikat di laut tersebut.
"Dari pemeriksaan di samping perbuatan yang terjadi, penyidik juga mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawankawan itu membuat, menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang," kata Djuhandhani di Bareskrim Polri, Senin (10/2) malam.
"Kemudian selanjutnya ada peran-peran yang membantu yang tentu saja dari peran-peran pembantu dan lain sebagainya ini akan kita lengkapi alat buktinya lebih lanjut," ujarnya menabahkan.

Djuhandhani mengaku pihaknya juga akan mendalami pihak-pihak yang menerbitkan surat HGB maupun SHM di laut Tangerang. Saat ini pihaknya masih mengusut proses pengajuan surat dari tingkat kepala desa.
"Kita belum berkembang sampai situ kita awali dari awal, dari ujungnya akan kita ketahui bahwa terbitnya itu berawal dari surat dari Kepala Desa," katanya.
Djuhandhani mengatakan dari 44 saksi yang sudah pihaknya periksa, selain Arsin dan istri, ada juga warga desa dan pejabat kementerian terkait
"Kami juga memanggil dari kementerian ataupun instansi-instansi terkait termasuk ahli kita sudah memeriksa," ujarnya.
Djuhandhani menyebut Arsin masih berstatus saksi dalam kasus ini. Ia membuka peluang menjerat yang bersangkutan sebagai tersangka jika bukti-bukti sudah lengkap.

"Kami akan segera menggelarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan-keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut, sementara itu," ujarnya.
Sebelumnya Bareskrim juga melakukan pengeledahan di tiga lokasi yakni Kantor Desa Kohod, Rumah Kepala Desa Kohod Arsin, serta rumah Sekretaris Desa Kohod.
Bareskrim Polri telah meningkatkan status perkara kasus dugaan pemalsuan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Hak Milik (SHM) yang ada di wilayah pagar laut Tangerang ke tahap penyidikan.
Melalui peningkatan status tersebut artinya penyidik telah menemukan unsur dugaan tindak pidana yang terjadi. Selanjutnya penyidik akan melakukan pemeriksaan saksi hingga pengumpulan alat bukti untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini. **(cnni/js)**

Prabowo Sambut Erdogan

Dari Halaman 1

gi Prabowo selama jalan bersama.
Erdogan tiba di RI dalam rangkaian tur tiga negara Asia. Erdogan mengunjungi Malaysia terlebih dulu sebelum ke Indonesia, dan kemu-

dian akan melanjutkan perjalanan ke Pakistan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Rolliansyah 'Roy' Soemirat mengatakan Erdogan akan melakukan kunjungan bilateral, serta melakukan pertemuan Dewan Kerja Sama Strategis Tingkat Tinggi untuk pertama kalinya dengan Prabowo.

"Ini merupakan forum bilateral reguler tertinggi di antara kedua negara yang dipimpin langsung oleh kepala negara, sehingga semua hal-hal yang menjadi common concern dari kedua negara akan langsung di-highlight, akan langsung dibahas pada pertemuan high level tersebut," kata Roy. **(cnni/js)**

Korut Kecam Kehadiran Kapal Selam

Dari Halaman 1

regional.
Kemunculan kapal selam serang cepat USS Alexandria di Semenanjung Korea dinilai mencerminkan upaya berkelanjutan AS untuk memprovokasi Korea Utara.
"Kami menyatakan keprihatinan mendalam atas tindakan militer AS yang berbahaya dan bermusuhan yang dapat menyebabkan konfrontasi militer akut di kawasan sekitar semenanjung Korea menjadi konflik angkatan bersenjata yang sebenarnya," kata juru bicara Kemenhan Korut, seperti dimuat kantor berita resmi KCNA pada Selasa (11/2).

Juru bicara tersebut juga menegaskan bahwa angkatan bersenjata Korea Utara akan tanpa ragu-ragu menggunakan hak yang sah untuk menghukum para provokator.
Namun, pernyataan tersebut tidak merinci langkah-langkah spesifik yang mungkin diambil oleh Pyongyang sebagai respons.
Sementara itu, media Korea Selatan melaporkan bahwa kapal selam bertenaga nuklir tersebut tiba di Busan untuk mengisi kembali perbekalan dan memberikan waktu istirahat bagi awaknya.
Angkatan Laut AS menyebut USS Alexandria sebagai bagian dari Armada Pasifik yang dilengkapi dengan rudal jelajah Tomahawk. Korea Utara secara rutin mengancam

keberadaan aset militer AS di kawasan serta latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan AS.
Pada Ahad, 9 Februari 2025, Pyongyang memperingatkan bahwa tindakan Washington dan Seoul dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan.
Situasi ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan sejak Donald Trump kembali menjabat sebagai Presiden AS bulan lalu.
Meski Trump sebelumnya mengisyaratkan kesediaannya untuk berdialog langsung dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, Pyongyang tetap mempertahankan sikap agresifnya terhadap kehadiran militer AS di kawasan tersebut. **(rm/js)**

Stok LPG 3 Kg Dipastikan.....

Dari Halaman 1

diantaranya Mulyadi, Alfons Manibui, Dewi Yustisiana, Christina Eugenia Paruntu, dan Sigit Karyawan Yunianto.
Mereka didampingi oleh pihak Pertamina yakni Direktur Pertamina Holding Alfian Nasution, Dirut Patra Niaga Riva Siahaan dan Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Achmad Muchtasyar.
Bambang yang juga politisi Golkar ini menyampaikan bahwa penataan distribusi LPG 3 kg sudah berjalan sesuai dengan skema yang dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadalia.
"Skema yang telah dilakukan Menteri ESDM sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuannya agar masyarakat bisa mendapatkan LPG 3 kg dengan harga murah," kata Bambang dalam keterangannya dikutip Selasa (11/2).

Lebih lanjut, Bambang Patijaya yang akrab disapa BPJ ini mengatakan bahwa di lapangan saat melakukan sidak baik di SPBE dan pangkalan stok aman.
"Untuk di pengecer, gas LPG 3 kg sudah sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan," pungkasnya.
Selain itu, Bambang pun mengatakan bahwa ada beberapa titik terjadi antri kecil dan sudah teratasi.
"Jadi kemarin-kemarin itu sempat ada titik kecil antri, sekarang sudah diatasi dan betul-betul clear sudah tidak ada masalah," katanya.
Bambang Patijaya pun telah memastikan bahwa telah mengkosok seluruh provinsi bahwa pasokan gas LPG 3Kg aman.
"Kami sudah cek ke berbagai provinsi bahwa pasokan LPG 3 kg aman. Masyarakat nggak perlu panic buying, karena stok nasional sangat cukup, distribusi dan harga lebih terjamin dan terkendali," ujarnya.

Untuk itu, ia juga menghimbau kepada pemerintah agar masyarakat tetap mendapatkan gas di Harga Eceran Tertinggi (HET) dari LPG 3 kg itu.
Tak hanya itu, Bambang Patijaya juga minta gas melon ini disalurkan dengan tepat sasaran sesuai dengan yang berhak.
"Dan kami juga mendorong dilakukan upaya untuk memberantas upaya pengoplosan LPG 3 kg ini dan memastikan agar gas yang diterima masyarakat harus sesuai berat timbangannya yaitu 3Kg," katanya.
Kemudian, Bambang Patijaya pun mengatakan kebijakan yang sedang dilaksanakan Menteri ESDM sudah tepat, terbukti dengan sidak yang dirinya lakukan beberapa titik terutama di SPBE di Jakarta Barat ini terkendali.
"Penataan distribusi atau penyaluran Gas LPG 3 kg yang sedang dilakukan skemanya sudah tepat, karena sidak hari ini stok aman dan harga terkendali sesuai HET," ujarnya. **(cnni/js)**

Razman Nasution Dilaporkan

Dari Halaman 1

Ia menyebut pelaporan itu juga merupakan perintah langsung dari Mahkamah Agung (MA).
"Jadi atas kejadian itu kami juga enggak diam. Kami punya punya pengadilan tinggi, kita ke Mahkamah. Ini atas nama lembaga, jadi ada perintah," tuturnya.
Lebih lanjut, Maryono mengatakan, mereka juga belum menerima permintaan maaf secara resmi dari Razman dan timnya buntut kericuhan yang mereka lakukan di sidang.
"Maaf kepada Pengadilan Tinggi, minta maaf kepada PN Jakut, kepada Kejaksaan, kepada Mahkamah Agung. Kalau permintaan maaf langsung, belum ada," jelasnya.
Maryono menjelaskan, dalam laporannya itu Razman dan tim di duga melanggar Pasal 335 KUHP dan/atau Pasal 207 KUHP dan/atau Pasal 217 KUHP tentang tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan sengaja di muka umum, menghina suatu penguasa atau badan hukum, dan membuat gaduh dalam sidang.
Razman menyebut laporan itu sebagai tragedi bagi institusi

hukum seperti Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Ia mengklaim tindakannya dan tim kuasa hukum masih wajar ketika keberatan dengan keputusan hakim menggelar sidang secara tertutup.
Menurut Razman, keputusan hakim itu diambil secara sepihak. Ia bahkan berencana akan melaporkan balik atas dugaan menyalahgunakan kewenangan.
"Kami akan buktikan di kepolisian bahwa apa yang kami lakukan adalah tindakan yang benar, justru kami akan laporkan hakim tersebut yaitu menyalahgunakan kewenangan," kata dia saat dihubungi awak media, Selasa.
"Kami akan laporkan hakim tersebut dalam penyalahgunaan kewenangan karena dia memaksa secara sepihak dan memaksakan untuk merampas kemerdekaan sebagai lawyer yang dilindungi undang-undang agar dilakukan persidangan yang berimbang," imbuhnya.
Sebelumnya, kericuhan pecah saat sidang kasus dugaan pemecaran nama baik terhadap Hotman Paris dengan terdakwa Razman Arif Nasution di PN Jakarta Utara, Kamis (6/2).



Semua bermula saat hakim memutuskan sidang digelar tertutup lantaran materi sidang bermuatan asusila. Keputusan hakim itu ditentang Razman. Namun, keputusan hakim tetap tak berubah.
Sidang kemudian ricuh hingga akhirnya hakim memutuskan sidang diskors sampai situasi kondusif. Lalu, setelah hakim keluar dari ruang sidang, Razman langsung menghampiri Hotman.
Momen itu turut diunggah Hotman di akun Instagram miliknya @hotmanparisofficial. Dalam video yang diunggah, terlihat Razman langsung menghampiri Hotman yang duduk di kursi saksi depan meja hakim.
Razman kemudian memegang bahu Hotman sambil mengucapkan sesuatu. Razman juga terlihat menunjuk-nunjuk Hotman menggunakan jarinya.
Sejumlah tim Hotman langsung menghampirinya dan membawanya keluar ruang sidang. Sementara itu, sejumlah pengacara Razman juga mendatangnya dan berusaha menahannya.
Namun, kemudian secara tiba-tiba salah satu pengacara Razman justru terlihat naik ke atas meja.
"Seorang pengacara yang adalah tim kuasa hukum dari Razman naik ke meja, dari tim kuasa hukum dan menginjak-injak meja, menginjak-injak meja dan naik ke meja dari tim kuasa hukum dalam persidangan tersebut, walaupun waktu itu majelis hakim sudah meninggalkan ruang sidang karena sudah sangat tidak kondusif," tutur Hotman dalam video. **(cnni/js)**

DPR Evaluasi

Dari Halaman 1

jaga martabat mitra kerja. Menurut Rifqi, hasil evaluasi itu akan diserahkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti sesuai aturan undang-undang.
"Kedua tentu evaluasi terkait dengan person-person yang dulu dihasilkan melalui uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Kenapa kami lakukan secara tertutup, kami ingin menjaga harkat dan martabat mitra kerja kami," kata Rifqi usai rapat.
Evaluasi itu merupakan implementasi dari Tata Tertib baru DPR yang disahkan sebelumnya. Tata tertib itu memberi kewenangan bagi DPR mengevaluasi pejabat yang disahkan melalui Paripurna.
Dalam ketentuan yang tertuang pada Pasal 228A ayat 1 dan 2 Tata Tertib DPR itu, evaluasi termasuk mencakup rekomendasi pencopotan. Namun, keputusan akhir tetap akan diserahkan kepada lembaga terkait atau Presiden.
Sementara itu, Komisi II DPR memberi catatan yang dipilih dan disahkan melalui Paripurna DPR. Mereka yakni, Ratna Dewi Pettalolu, Muhammad Tio Aliansyah, dan I Dewa Raka Sandi.
Dalam rapat, Rifqi mengatakan pihaknya juga memberi catatan terhadap mekanisme penyelesaian perkara etik pemilu. Menurut dia, Komisi II DPR memberi catatan kepada DKPP yang tebang pilih menyelesaikan aduan.
"Ada pengaduan yang udah sangat lama ga disidangkan, ada pengaduan yg baru masuk cepat disidangkan dan bahkan cepat diputus," katanya.
"Salah satu yang mereka sampaikan mereka mendahulukan perkara-perkara yang diadakan ke MK agar kemudian putusan DKPP memberi input proses pembuktian di Mk menurut kami ini pernyataan yang agak fatal," imbuh Rifqi.
Ketua DKPP, Heddy Lukito menyatakan tak mau berspekulasi soal peluang pencopotan pimpinan hasil evaluasi tersebut. Dia juga mengaku tak tahu menahu soal hasil rekomendasinya.
"Kalau soal rapat tolong tanyakan ke Komisi II ya," kata Heddy. **(cnni/js)**

Bahlil Nonaktifkan

Dari Halaman 1

syar sudah harus kehilangan posisinya sebagai salah satu pejabat Kementerian ESDM.
"Ya itu biasa bagian daripada konsolidasi dari institusi," ujar Bahlil ditemui di Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (11/2).
Menurut Bahlil, penonaktifan ini dilakukan per Senin (10/2). Di mana ini merupakan bagian dari proses sebelum pencopotan secara resmi.
"Kalau yang mencopot itu kan harus pakai Keppres. Sambil berjalan non aktif, ya udah ya. Mulai kemarin (nonaktif)," jelasnya.
Posisi dirjen migas yang kosong saat ini untuk sementara digantikan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno.
"Plh dirjen migas adalah Dirjen minerba," jelas Bahlil.
Namun, Bahlil enggan menyebutkan penyebab nonaktif dirjen migas tersebut. Tapi baru-baru ini, unit tersebut tengah menjadi sorotan imbas kebijakan LPG 3 kg. **(cnni/js)**



Raja Kecil

Dari Halaman 1

beberapa alasan dari perspektif komunikasi politik dan media. Pernyataan ini tidak menyebut nama atau institusi tertentu, sehingga memicu rasa penasaran di kalangan publik, media, dan politisi. Spekulasi tentang siapa yang dimaksud menjadi bahan diskusi luas, yang pada akhirnya memperpanjang masa pemberitaan dan membuat isu ini tetap relevan.
Dengan menyebut adanya "raja kecil" yang menghambat kebijakan efisiensi anggaran, Prabowo membongkar dirinya sebagai pemimpin yang ingin memberantas pemborosan dan mengutamakan kepentingan rakyat. Ini memperkuat citranya sebagai pemimpin yang tegas dan berani melawan status quo.
Istilah ini dapat digunakan untuk mendisiplinkan birokrasi atau elite politik tertentu tanpa perlu menyebutkan mereka secara langsung. Hal ini dapat menciptakan efek psikologis di mana para pejabat yang merasa tersinggung akan berhati-hati dalam bertindak.
Menanggapi pernyataan ini, Ketua DPP PDI-Perjuangan, Deddy Sitorus, menyarankan agar Presiden Prabowo menyebutkan secara jelas siapa sosok "raja kecil" yang dimaksud, untuk menghindari spekulasi dan memastikan transparansi dalam pemerintahan.
Pernyataan mengenai "raja kecil" ini muncul di tengah upaya pemerintah melakukan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun (sekitar \$29,8 miliar) dengan tujuan menghilangkan pemborosan dan mengalokasikan dana untuk program prioritas. Kebijakan ini mencakup pengurangan penggunaan energi di gedung-gedung pemerintah dan pembatalan program yang dianggap tidak esensial. Beberapa lembaga, seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, mengalami pemotongan anggaran yang signifikan, yang berpotensi mempengaruhi kemampuan mereka dalam merespons bencana. Kementerian Pekerjaan Umum juga menghadapi pengurangan anggaran yang besar, yang dapat berdampak pada pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur publik. Meskipun ada kekhawatiran bahwa langkah-langkah penghematan ini dapat mempengaruhi layanan penting dan pertumbuhan ekonomi, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kehati-hatian finansial dan prioritas pengeluaran untuk kepentingan publik tanpa pemborosan yang tidak perlu.
Dalam komunikasi politik, konflik sering digunakan sebagai strategi untuk memperkuat posisi politik. Membangun citra sebagai pemimpin yang berani melawan status quo dapat memperkuat popularitasnya, terutama jika masyarakat merasa ada ketidakefisienan dalam birokrasi. Namun, tanpa kejelasan siapa yang dimaksud, pernyataan ini juga bisa menciptakan ketidakpastian di dalam pemerintahan dan birokrasi.
Dari sudut pandang teori komunikasi politik, pernyataan Prabowo ini dapat dilihat sebagai bagian dari strategi framing, agenda-setting, dan wacana politik yang bertujuan untuk: Menegaskan posisinya sebagai pemimpin tegas yang ingin melakukan perubahan. Menarik perhatian publik terhadap isu efisiensi anggaran. Menyampaikan peringatan kepada birokrat atau pihak yang dianggap menghambat kebijakan. Namun, efektivitas strategi ini bergantung pada bagaimana media, oposisi, dan publik menanggapi serta menginterpretasikan pernyataan tersebut.